



Komunikasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Bukittinggi antara Programatik dan Berkelanjutan

Tiara Salsabila Putri¹, Rahmadani Yusran^{2*}

¹Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Correspondence E-mail: tiarasalsabilaputri807@gmail.com

yusranrdy@fis.ac.id*

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi dengan menempatkan komunikasi sebagai instrumen implementasi kebijakan yang menentukan keterpaduan lintas sektor dan keberlanjutan perubahan perilaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci lintas sektor (BKKBN, OPD terkait, dan tenaga gizi puskesmas) serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman serta pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan: (1) komunikasi kebijakan telah berjalan dalam kerangka percepatan penurunan stunting nasional, namun praktiknya masih dominan programatik dan mengikuti siklus kegiatan; (2) terdapat ketidakselarasan antara mandat lintas sektor dan praktik komunikasi yang cenderung sektoral, sehingga integrasi pesan dan pembelajaran lintas aktor belum optimal; (3) komunikasi kebijakan diwujudkan melalui tiga bentuk utama koordinasi, sosialisasi pada titik layanan/komunitas, dan media, tetapi belum terorkestrasi dalam satu arsitektur komunikasi yang terpadu dan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan utama bukan sekadar intensitas sosialisasi, melainkan kualitas tata kelola komunikasi kebijakan, integrasi lintas sektor, keseragaman pesan inti, basis data dan sasaran bersama, serta pelembagaan mekanisme komunikasi untuk memastikan keberlanjutan pencegahan stunting di tingkat kota.

Article Information

Riwayat Artikel:

Diterima 30 November 2025

Direvisi 14 Desember 2025

Diterbitkan 15 Desember 2025

Tersedia Online 16 Desember 2025

Publikasi 16 Desember 2025

Keyword:

komunikasi kebijakan;
pencegahan stunting;
konvergensi; lintas sektor; Kota Bukittinggi.

1. INTRODUCTION

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan/atau infeksi berulang yang terjadi terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dampaknya tidak hanya pada tinggi badan, tetapi juga pada perkembangan kognitif serta produktivitas jangka panjang. Secara nasional, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) melaporkan prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 19,8% (turun dari 21,5% pada 2023). Walaupun tren penurunan berlangsung, capaian tersebut menunjukkan bahwa percepatan pencegahan stunting tetap memerlukan penguatan strategi implementasi, termasuk penguatan komunikasi yang mampu mendorong perubahan perilaku dan mengonsolidasikan dukungan lintas aktor (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

Di tengah kompleksitas tersebut, komunikasi kebijakan menjadi prasyarat agar tujuan kebijakan dipahami, diterima, dan dijalankan oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. OECD menempatkan komunikasi pemerintah sebagai fungsi tata kelola yang melekat pada siklus kebijakan—membangun pemahaman, legitimasi, dan dukungan publik—bukan sekadar penyebaran informasi satu arah. Dalam konteks kesehatan masyarakat, WHO menekankan perlunya komunikasi strategis yang terencana untuk memengaruhi norma sosial dan perilaku, sedangkan UNICEF menegaskan bahwa komunikasi perubahan perilaku (social and behavior change) bersifat berbasis bukti, partisipatif, serta mendorong keterlibatan dan umpan balik dari komunitas. Kerangka ini menempatkan komunikasi sebagai proses yang harus dirancang, dikelola, dan dievaluasi sebagai bagian integral dari implementasi kebijakan (OECD, 2021 ; WHO, 2017 ; UNICEF, 2024).

Komitmen nasional Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang memuat lima pilar Strategi Nasional. Pilar 2 secara eksplisit menempatkan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen kunci, antara lain melalui pelaksanaan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan, penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting, serta penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pencegahan stunting bukan hanya aktivitas promosi kesehatan, melainkan kebutuhan tata kelola yang menghubungkan agenda kebijakan, koordinasi pelaksana, dan praktik perubahan perilaku pada tingkat rumah tangga (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018; Pemerintah Indonesia, 2021).

Pada level daerah, Kota Bukittinggi membentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-95-2025. Pembentukan tim ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitas komitmen tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi kebijakan dijalankan: sejauh mana koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) berlangsung, bagaimana pesan pencegahan distandardisasi, bagaimana kanal komunikasi dimanfaatkan (tatap muka, kelembagaan komunitas, maupun kanal digital), serta bagaimana umpan balik dari masyarakat diolah menjadi perbaikan strategi pencegahan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kombinasi kanal komunikasi cenderung lebih efektif dibandingkan penggunaan satu kanal saja. Evaluasi terhadap National Nutrition Communication Campaign (NNCC) di Indonesia menunjukkan bahwa paparan pesan melalui

media massa dan komunikasi interpersonal berasosiasi positif dengan peningkatan pengetahuan tentang ASI eksklusif, kesadaran pentingnya gizi pada 1.000 HPK, serta meningkatnya keterpaparan isu stunting. Hall dkk. menggambarkan NNCC sebagai kampanye multi-kanal yang menggabungkan media, komunikasi interpersonal, dan mobilisasi sosial, sekaligus melakukan advokasi kepada pengambil keputusan daerah untuk memperkuat komitmen pemerintah. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa komunikasi pencegahan stunting bekerja melalui arsitektur kanal, aktor, dan pesan yang saling menguatkan (Moffat et al., 2021; Hall et al., 2018).

Di tingkat internasional, program skala besar seperti Addressing Stunting in Tanzania Early (ASTUTE) menunjukkan bahwa social and behavior change communication (SBCC) dapat dirancang komprehensif—menggabungkan media massa, komunikasi interpersonal (kunjungan rumah dan edukasi), pendekatan kelompok, mobilisasi komunitas, konseling berbasis fasilitas layanan, dan penguatan kapasitas multisektor—serta berkaitan dengan perbaikan pengetahuan, sikap, dan praktik yang relevan dengan pencegahan stunting. Sejalan dengan itu, tinjauan sistematis menunjukkan bahwa intervensi SBCC multi-platform cenderung layak dan efektif untuk memperbaiki praktik pemberian makan bayi dan anak serta menurunkan prevalensi stunting (Dearden et al., 2023 ; Darajat et al., 2022).

Meski demikian, sebagian besar studi di atas cenderung menempatkan komunikasi sebagai ‘intervensi program’ yang diukur dampaknya pada pengetahuan atau perilaku individu, atau sebatas menginventarisasi hambatan implementasi. Kajian komunikasi kebijakan pada level pemerintah daerah masih terbatas, termasuk bagaimana komunikasi dikelola sebagai proses tata kelola: mekanisme koordinasi lintas-OPD, pembagian peran komunikator, konsistensi pesan lintas kanal, pemanfaatan data untuk segmentasi sasaran, serta desain komunikasi dua arah yang menopang akuntabilitas dan keberlanjutan. Studi di Kota Padang, misalnya, menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, dan pemanfaatan media, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, perbedaan cara pandang lintas-OPD, ketiadaan program khusus, dan keterbatasan data (Ikhsan & Yusran, 2023).

Bertolak dari fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi dengan menekankan dimensi antara programatik dan berkelanjutan. Penelitian ini membedakan komunikasi yang bersifat programatik (episodik, bergantung proyek/kegiatan, dan kurang terinstitusionalisasi) dengan komunikasi yang berkelanjutan (terencana, terkoordinasi, berbasis data, serta dipraktikkan secara konsisten lintas aktor dan kanal). Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat menawarkan pemahaman yang lebih tajam mengenai kualitas tata kelola komunikasi kebijakan pencegahan stunting di tingkat kota, sekaligus memberikan dasar rekomendasi perbaikan strategi komunikasi yang selaras dengan pilar nasional percepatan penurunan stunting.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi, terutama dalam konteks koordinasi lintas sektor dan praktik komunikasi yang bersifat programatik maupun berkelanjutan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bukittinggi melalui teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki struktur kelembagaan percepatan pencegahan stunting dan dinamika koordinasi yang relevan untuk dianalisis (Moleong, 2000).

Informan penelitian dipilih secara purposive dari aktor-aktor kunci yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penguatan komunikasi pencegahan stunting. Informan meliputi unsur Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat serta perangkat daerah terkait di Kota Bukittinggi, yaitu Dinas Kesehatan, DP3APPKB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Badan Perencanaan/riset pembangunan daerah (Bappelitbangda), Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian dan Pangan. Selain itu, penelitian juga melibatkan tenaga gizi di Puskesmas Guguk Panjang dan Puskesmas Mandiangin sebagai informan pada tingkat layanan primer.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali mekanisme komunikasi, alur koordinasi, penyampaian pesan, serta kendala dan praktik baik dalam pencegahan stunting. Data primer juga diperkuat melalui studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, notulensi/hasil rapat, pedoman pelaksanaan program, serta literatur ilmiah yang relevan dengan komunikasi kebijakan pencegahan stunting.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman, yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2017). Proses analisis berlangsung secara iteratif dan berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian untuk memastikan temuan yang dihasilkan tetap konsisten dengan fokus penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2017). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar-informan dari berbagai institusi (BKKBN, OPD terkait, dan tenaga gizi puskesmas). Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan catatan kelembagaan yang relevan, sehingga interpretasi temuan lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Komunikasi kebijakan dalam kerangka pencegahan stunting

Secara normatif, komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Indonesia telah ditempatkan sebagai komponen strategis dalam kerangka percepatan penurunan stunting nasional. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting secara eksplisit menempatkan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku sebagai bagian dari Pilar 2, dengan penekanan pada keberlanjutan, konsistensi pesan, serta penguatan kapasitas institusi pelaksana. Dalam dokumen kebijakan tersebut ditegaskan bahwa perubahan perilaku keluarga dan komunitas hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang dirancang secara sistematis, dilaksanakan lintas sektor, dan didukung oleh kelembagaan yang kuat (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Penempatan komunikasi dalam pilar strategis ini mengandung implikasi dimana komunikasi kebijakan tidak diposisikan sebagai aktivitas teknis pendukung program, melainkan sebagai instrumen implementasi kebijakan yang harus dikelola secara terencana, terkoordinasi, dan terinstitusionalisasi. Perencanaan komunikasi mencakup penentuan sasaran prioritas berbasis data, perumusan pesan kunci yang seragam, serta pemilihan kanal komunikasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran. Koordinasi komunikasi menuntut keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar pesan pencegahan stunting tidak terfragmentasi secara sektoral. Sementara itu, institusionalisasi komunikasi menuntut adanya mekanisme, prosedur, dan pembagian peran yang memastikan komunikasi berjalan secara berkelanjutan, tidak bergantung pada kegiatan atau aktor tertentu.

Namun, temuan penelitian di Kota Bukittinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik komunikasi di tingkat daerah. Secara kelembagaan, pemerintah daerah telah membentuk struktur percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai OPD dan jejaring layanan. Keberadaan kelembagaan ini menunjukkan adanya komitmen formal terhadap agenda nasional percepatan penurunan stunting. Akan tetapi, dalam praktiknya, komunikasi kebijakan yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan komunikasi yang terencana dan terinstitusionalisasi sebagaimana dimandatkan oleh kebijakan nasional.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi masih dominan bersifat programatik dan situasional, yaitu mengikuti siklus pelaksanaan kegiatan atau intervensi tertentu. Komunikasi cenderung menguat pada saat pelaksanaan program (misalnya posyandu, pendampingan keluarga, atau kegiatan sosialisasi), namun melemah di luar momentum tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa komunikasi belum dikelola sebagai sistem yang berkelanjutan, melainkan sebagai bagian dari rutinitas pelaksanaan program. Akibatnya, kesinambungan pesan, konsistensi sasaran, dan akumulasi pembelajaran lintas aktor belum terjaga secara optimal.

Dari sisi koordinasi, meskipun komunikasi lintas OPD berlangsung melalui rapat dan forum koordinatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tersebut belum sepenuhnya berbasis pada satu peta data dan pesan kebijakan yang sama. Padahal, pedoman pelaksanaan intervensi terintegrasi menegaskan bahwa pemetaan program dan kegiatan, cakupan intervensi, serta sebaran prevalensi stunting harus menjadi dasar bersama bagi seluruh sektor dalam menentukan lokasi prioritas dan strategi intervensi, termasuk strategi komunikasinya (Bappenas, 2019). Ketidakterpaduan ini menyebabkan komunikasi kebijakan berjalan sejajar dengan program sektoral masing-masing, alih-alih menjadi pengikat lintas sektor.

Secara struktural, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Komunikasi masih sangat bergantung pada program, kegiatan, dan inisiatif OPD tertentu, serta belum ditopang oleh mekanisme baku yang mengatur integrasi pesan, alur informasi, dan umpan balik lintas sektor. Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan lebih berfungsi sebagai alat operasional untuk mendukung pelaksanaan program jangka pendek, bukan sebagai instrumen strategis untuk membangun perubahan perilaku dan norma sosial secara berkelanjutan.

Implikasinya, penguatan komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi tidak cukup dilakukan dengan menambah intensitas sosialisasi atau kampanye, tetapi memerlukan penataan ulang tata kelola komunikasi. Komunikasi perlu dirancang sejak tahap perencanaan kebijakan, dikoordinasikan secara lintas sektor berbasis data bersama, serta dilembagakan melalui mekanisme dan prosedur yang menjamin kesinambungan pesan dan pembelajaran kebijakan. Dengan demikian, komunikasi kebijakan dapat bergerak dari sekadar aktivitas programatik menuju sistem komunikasi yang berkelanjutan, sebagaimana dikehendaki dalam kerangka nasional percepatan penurunan stunting.

Ketidakselarasan mandat lintas sektor dan praktik sektoral dalam komunikasi kebijakan

Secara normatif, pencegahan/penurunan stunting dirancang sebagai kerja lintas sektor yang dikonsolidasikan melalui mekanisme konvergensi. Kerangka nasional menekankan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan orkestrasi aktor dan intervensi multisektoral dalam satu arah kebijakan, sehingga koordinasi dan penyelarasan praktik lintas OPD menjadi prasyarat tata kelola.

Namun, temuan lapangan di Kota Bukittinggi menunjukkan adanya ketidakselarasan antara mandat lintas sektor dan praktik komunikasi kebijakan yang berlangsung. Meskipun struktur kelembagaan lintas OPD telah terbentuk, praktik komunikasi masih cenderung berjalan menurut logika sektoral, yakni masing-masing OPD menyampaikan pesan sesuai mandat programnya sendiri. Dengan demikian, konvergensi lebih tampak pada level struktur (forum/kelembagaan), tetapi belum sepenuhnya terwujud pada level arsitektur pesan, pembagian peran komunikasi lintas kanal, dan pembelajaran lintas aktor. Pola ini sejalan dengan kajian yang menyoroti kecenderungan komunikasi pencegahan stunting di tingkat daerah yang masih sektoral dan belum terintegrasi secara efektif (Febrian & Yusran, 2021 ; Ikhsan & Yusran, 2023).

a. Mandat lintas sektor menuntut koordinasi komunikasi yang terencana, tetapi prasyarat koordinasinya belum sepenuhnya terpenuhi

Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi menekankan bahwa koordinasi lintas sektor perlu ditata secara operasional melalui kejelasan forum koordinasi, penanggung jawab, agenda pembahasan, keteraturan pertemuan, serta dukungan rencana kerja dan pembiayaan operasional. Pedoman ini juga menegaskan bahwa koordinasi tidak hanya mencakup hubungan antar-OPD, tetapi juga keterpaduan koordinasi antara penyedia layanan dengan upaya komunikasi perubahan perilaku (Bappenas, 2019).

Dalam praktik di Kota Bukittinggi, koordinasi lintas sektor memang berlangsung melalui struktur kelembagaan dan pertemuan koordinatif. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan komunikasi yang berkelanjutan. Komunikasi lintas sektor lebih sering menguat pada fase pelaksanaan program, misalnya pada momen posyandu, sosialisasi program, pendampingan keluarga, kegiatan remaja melalui duta/kelompok sebaya, penyaluran bantuan sosial, serta program ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal daripada berjalan sebagai sistem komunikasi yang dipertahankan secara rutin di luar momentum kegiatan. Akibatnya, kesinambungan pesan lintas sektor dan konsistensi sasaran komunikasi belum sepenuhnya terjaga dari waktu ke waktu.

b. Praktik sektoral diperkuat oleh problem struktural, namun data belum terpadu dan pembelajaran lintas sektor belum optimal

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa fragmentasi data dan lemahnya mekanisme berbagi informasi lintas aktor menjadi faktor yang memperkuat praktik komunikasi sektoral. Dokumen strategi percepatan penurunan stunting menegaskan bahwa stunting adalah persoalan multisektoral sehingga memerlukan sistem manajemen data terpadu menuju prinsip Satu Data percepatan penurunan stunting agar informasi akurat, mudah diakses lintas instansi, dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan sasaran, pemantauan capaian, serta tindakan korektif (Bappenas, 2018).

Dalam konteks Bukittinggi, ketika data sasaran dan capaian intervensi belum sepenuhnya menjadi rujukan bersama lintas OPD, maka komunikasi cenderung mengikuti prioritas sektoral masing-masing. Dinas/layanan kesehatan menonjolkan pesan gizi dan

pemantauan tumbuh-kembang. Perangkat yang menangani keluarga berencana/pendampingan keluarga menekankan pendampingan keluarga berisiko dan edukasi remaja. Perangkat sosial menekankan perlindungan sosial, sedangkan perangkat pertanian dan pangan menekankan ketahanan pangan. Pola ini menunjukkan bahwa perbedaan mandat sektoral tidak otomatis menjadi kelemahan, tetapi menjadi problem komunikasi kebijakan ketika tidak ada basis data bersama dan standardisasi pesan lintas sektor yang mengikat seluruh aktor.

c. Dampak komunikasi kebijakan pesan ke masyarakat tidak utuh, dan konvergensi cenderung tampil sebagai paralelisme program

Konsekuensi dari kondisi di atas adalah pesan kebijakan yang diterima masyarakat berpotensi tidak terbaca sebagai satu rangkaian pencegahan yang utuh. Masyarakat memperoleh banyak informasi tentang stunting, tetapi informasi tersebut hadir sebagai potongan pesan yang mengikuti program sektoral (gizi, remaja, bantuan sosial, pangan) dan tidak selalu disatukan dalam satu kerangka pesan bersama yang mudah dipahami sebagai alur tindakan rumah tangga dan komunitas. Situasi ini berpengaruh pada karakter komunikasi yang menjadi dominan satu arah dan bersifat instruksional kuat untuk menjelaskan prosedur program, tetapi lebih lemah untuk membangun pemahaman terpadu dan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan penelitian lain memperkuat penelitian ini. Studi di Kota Padang menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pencegahan stunting dijalankan melalui koordinasi, sosialisasi, dan pemanfaatan media, tetapi belum optimal karena keterbatasan data, anggaran, serta perbedaan persepsi lintas OPD. (Ikhsan & Yusran, 2023 ; Febrian & Yusran, 2021). Dengan demikian, persoalan komunikasi sektoral bukan semata persoalan intensitas sosialisasi, melainkan terkait dengan absennya perangkat operasional yang memastikan konvergensi pada level komunikasi, basis data bersama, kesepakatan pesan inti lintas sektor, pembagian peran kanal komunikasi, serta mekanisme umpan balik lintas aktor.

Bentuk-bentuk komunikasi kebijakan: koordinasi, sosialisasi, dan media

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi berlangsung melalui tiga bentuk utama, yaitu komunikasi koordinatif antarlembaga, komunikasi sosialisasi/edukasi pada titik layanan dan komunitas, serta komunikasi melalui media. Ketiga bentuk ini saling berhubungan, tetapi dalam praktiknya masih cenderung berjalan sebagai rangkaian aktivitas programatik yang mengikuti agenda masing-masing OPD, sehingga fungsi komunikasi sebagai instrumen perubahan perilaku berkelanjutan (Pilar 2) belum sepenuhnya terwujud (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

a. Komunikasi koordinatif melalui rapat/koordinasi lintas OPD sebagai kanal penghubung program

Pada level pemerintahan daerah, komunikasi kebijakan diwujudkan terutama melalui forum koordinasi lintas OPD yang terlibat dalam pencegahan stunting. Kanal ini berfungsi sebagai ruang menyampaikan perkembangan program, membagi peran, dan menyelaraskan pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Secara normatif, pedoman pelaksanaan intervensi terintegrasi memang menempatkan koordinasi lintas sektor dan koordinasi antara penyedia layanan dengan upaya komunikasi perubahan perilaku sebagai elemen penting yang perlu diperkuat agar integrasi layanan rumah tangga 1.000 HPK berjalan efektif (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi komunikasi di Bukittinggi belum sepenuhnya menghasilkan integrasi pesan lintas sektor. Koordinasi lebih sering berorientasi pada kebutuhan operasional program (pelaksanaan kegiatan, target, pelaporan), sementara standardisasi pesan inti dan pembagian peran komunikasi lintas kanal

belum menjadi prioritas yang konsisten. Hal ini sejalan dengan problem yang telah kamu rumuskan dalam naskah: koordinasi intervensi gizi spesifik belum optimal dan terdapat tumpang tindih program prioritas, yang pada gilirannya memengaruhi keterpaduan komunikasi kebijakan.

Pola serupa ditemukan pada studi komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang, yakni komunikasi hadir melalui koordinasi, sosialisasi, dan pemanfaatan media, tetapi belum optimal karena keterbatasan data/anggaran dan perbedaan persepsi lintas OPD. Temuan ini memperkuat interpretasi bahwa persoalan utama bukan ketiadaan forum, melainkan belum terbangunnya koordinasi sebagai mesin integrasi pesan lintas sektor (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

b. Komunikasi sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, dan edukasi pada titik layanan

Bentuk kedua adalah komunikasi yang berlangsung pada titik layanan dan komunitas, terutama melalui posyandu, puskesmas, kegiatan penyuluhan, dan pendampingan keluarga. Dalam temuan naskah, komunikasi cenderung menguat ketika ada kegiatan posyandu, sosialisasi program, pendampingan keluarga, kampanye remaja, hingga kegiatan terkait bantuan sosial dan ketahanan pangan.

Secara substantif, pola ini menunjukkan dua hal. Pertama, pemerintah daerah telah menggunakan kanal interpersonal dan komunitas sebagai sarana komunikasi kebijakan yang relatif dekat dengan sasaran. Kedua, komunikasi masih dominan bersifat episodik, karena intensitas dan kontinuitasnya sangat ditentukan oleh keberadaan kegiatan. Ini terlihat dari masalah yang kamu tuliskan: kegiatan penyuluhan belum intensif menjangkau seluruh wilayah, sehingga komunikasi belum konsisten dan berkelanjutan.

Studi kampanye komunikasi gizi di Indonesia menunjukkan bahwa paparan kampanye melalui media dan terutama komunikasi interpersonal (IPC) berasosiasi dengan peningkatan pengetahuan tentang ASI eksklusif, kesadaran pentingnya gizi 1.000 HPK, serta pengetahuan tentang stunting dan merekomendasikan kombinasi *mass media* dan *IPC* agar menjangkau luas sekaligus berdampak pada keyakinan/niat perilaku (Moffat et al., 2021). Implikasinya bagi Kota Bukittinggi adalah kanal sosialisasi (posyandu/pendampingan) sudah tepat sebagai instrumen kedalaman pengaruh, tetapi perlu disokong oleh sistem komunikasi yang menjamin keberulangan pesan dan keseragaman tema inti lintas OPD agar perubahan perilaku tidak berhenti pada pengetahuan sesaat.

c. Komunikasi melalui media, pemanfaatan media digital dan materi informasi yang belum optimal

Bentuk ketiga adalah komunikasi melalui media, termasuk materi informasi dan kanal digital. Dalam naskah, kamu menegaskan bahwa pemanfaatan media digital sebagai media komunikasi kampanye stunting masih kurang, sehingga komunikasi kebijakan belum berjalan optimal. Secara konseptual, media berfungsi memperluas jangkauan (*reach*) dan menjaga konsistensi pesan lintas ruang dan waktu. Namun, literatur kampanye gizi menegaskan bahwa kampanye sering tidak efektif bila hanya mengandalkan satu–dua kanal; karenanya perlu penggunaan berbagai media (*mass media*, radio lokal, materi kecil seperti banner/infografik, dan media sosial), yang dilengkapi komunikasi interpersonal serta mobilisasi sosial (Hall et al., 2018). Hall et al (2018) juga mengingatkan bahwa media massa memiliki keterbatasan, cenderung satu arah dan sulit ditailor sehingga media seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti strategi.

Dalam kasus Bukittinggi, lemahnya pemanfaatan media digital berdampak pada terbatasnya penguatan pesan di luar titik layanan (posyandu/puskesmas), sehingga kesinambungan komunikasi lebih sulit dijaga. Dengan kata lain, komunikasi kebijakan masih kuat pada momen tatap muka tetapi kurang kuat pada penguatan lintas waktu yang seharusnya dijaga oleh media.

Secara keseluruhan, tiga bentuk komunikasi (koordinasi–sosialisasi–media) sudah hadir dalam praktik pencegahan stunting di Kota Bukittinggi, tetapi keterhubungan antarbentuk tersebut belum sepenuhnya terorkestrasi menjadi sistem komunikasi kebijakan yang berkelanjutan. Padahal Pilar 2 menekankan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Temuan ini menjelaskan mengapa komunikasi kerap bersifat programatik koordinasi dominan administratif, sosialisasi bergantung agenda kegiatan, dan media digital belum dimanfaatkan optimal untuk menjaga konsistensi pesan dan keberulangan paparan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi telah berjalan dalam kerangka percepatan penurunan stunting nasional, namun implementasinya masih didominasi pola yang bersifat programatik dan belum sepenuhnya terlembagakan sebagai sistem komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Temuan pada bagian pertama menegaskan adanya jarak antara mandat normatif komunikasi dalam kerangka percepatan stunting dan praktik komunikasi di tingkat daerah yang masih mengikuti siklus kegiatan. Bagian kedua memperlihatkan bahwa ketidakselarasan antara mandat lintas sektor dan praktik sektoral bukan semata persoalan komitmen aktor, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan mekanisme koordinasi komunikasi, belum kokohnya basis data dan sasaran bersama, serta belum terbentuknya arsitektur pesan lintas OPD yang konsisten. Bagian ketiga kemudian mengonfirmasi bentuk-bentuk komunikasi yang dominan koordinasi, sosialisasi, dan media yang secara empiris sudah hadir, tetapi belum terorkestrasi secara terpadu sehingga pesan kebijakan cenderung prosedural, terfragmentasi, dan bergantung pada momentum program.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara membaca komunikasi kebijakan pencegahan stunting bukan sekadar sebagai aktivitas penyuluhan atau kampanye program, melainkan sebagai tata kelola komunikasi yang menghubungkan mandat kebijakan, koordinasi lintas sektor, kesatuan pesan, dan keberlanjutan perubahan perilaku pada tingkat kota. Dengan menempatkan Bukittinggi sebagai konteks empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama komunikasi kebijakan bukan terletak pada ada atau tidaknya sosialisasi, tetapi pada kualitas integrasi komunikasi yakni bagaimana koordinasi lintas OPD menghasilkan arsitektur pesan bersama, bagaimana data dan sasaran dipakai sebagai basis komunikasi, serta bagaimana tiga bentuk komunikasi (koordinasi, sosialisasi, media) disusun menjadi sistem yang berkesinambungan. Posisi ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang umumnya berhenti pada deskripsi kegiatan komunikasi atau evaluasi program, karena penelitian ini menekankan dimensi integrasi dan institusionalisasi komunikasi kebijakan sebagai kunci pencegahan stunting yang berkelanjutan di tingkat daerah.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi telah dijalankan dalam kerangka percepatan penurunan stunting nasional, namun praktiknya masih didominasi oleh pola komunikasi yang bersifat programatik dan sektoral. Komunikasi kebijakan lebih sering mengikuti siklus kegiatan dan agenda program masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai sistem komunikasi yang terencana, terkoordinasi, dan terinstitusionalisasi secara berkelanjutan.

Ketidakselarasan antara mandat lintas sektor dan praktik sektoral dalam komunikasi kebijakan menyebabkan integrasi pesan pencegahan stunting belum optimal. Meskipun struktur kelembagaan lintas sektor telah terbentuk, komunikasi kebijakan masih menghasilkan pesan yang terfragmentasi sesuai mandat sektoral, sehingga masyarakat

menerima informasi pencegahan stunting sebagai potongan-potongan program, bukan sebagai satu rangkaian tindakan yang utuh dan berkesinambungan.

Selain itu, komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi berlangsung melalui tiga bentuk utama, yaitu komunikasi koordinatif antarlembaga, komunikasi sosialisasi pada titik layanan dan komunitas, serta komunikasi melalui media. Ketiga bentuk ini telah berfungsi sebagai saluran implementasi kebijakan, namun belum terorkestrasi dalam satu arsitektur komunikasi kebijakan yang terpadu. Akibatnya, komunikasi kebijakan cenderung bersifat satu arah, prosedural, dan bergantung pada momentum kegiatan, sehingga daya dorongnya terhadap perubahan perilaku dan keberlanjutan pencegahan stunting masih terbatas.

Penelitian ini merekomendasikan, penguatan komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola komunikasi, bukan semata pada peningkatan intensitas sosialisasi. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi komunikasi lintas sektor dengan menata ritme, agenda, dan mekanisme kerja komunikasi kebijakan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghasilkan kesatuan pesan lintas OPD.

Kedua, diperlukan penguatan basis data dan sasaran bersama sebagai fondasi komunikasi kebijakan, sehingga pesan pencegahan stunting dapat diarahkan secara lebih tepat kepada kelompok prioritas dan mendukung konvergensi lintas sektor. Ketiga, komunikasi kebijakan perlu diorkestrasi secara terpadu dengan memadukan komunikasi koordinatif, sosialisasi di tingkat layanan dan komunitas, serta pemanfaatan media termasuk media digital sebagai penguat pesan lintas waktu. Dengan penguatan tersebut, komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi diharapkan dapat bergerak dari pola yang bersifat programatik menuju sistem komunikasi yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang.

7. REFERENCES

- Ahmad Darajat, D. A., Tukimin Sansuwito, S. T., Mayasyanti Dewi Amir, D. A. M., Hendri Hadiyanto, H. H., Dessy Abdullah, A. D., Nadia Purnama Dewi, P. D. N., & Ernawati Umar, U. E. (2022). Social behavior changes communication intervention for stunting prevention: A systematic review. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(G), 209–217.
- Dearden, K., Mulokozi, G., Linehan, M., Cherian, D., Torres, S., West, J., & Hall, C. (2023). The impact of a large-scale social and behavior change communication intervention in the lake zone region of Tanzania on knowledge, attitudes, and practices related to stunting prevention. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1214.
- Febrian F, & Yusran R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* , 3(1), 11–21.
- Hall, C., Syafiq, A., Crookston, B., Bennett, C., Hasan, M. R., Linehan, M., & Dearden, K. (2018). Addressing communications campaign development challenges to reduce stunting in Indonesia. *Health*, 10(12), 1764.
- Ikhsan, Muhammad, & Yusran, Rahmadani. (2023). Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 185–189. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4117>
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. (2018). *Strategi komunikasi perubahan*

perilaku dalam percepatan penurunan stunting. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. (2025). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Indonesia, Pemerintah. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163806/perpres-no-72-tahun-2021>

Moffat, R. C., Sayer, A., Hawks, M., DeCook, K., Traub, M., Linehan, M., & Hall, C. (2021). Effect of a national nutrition communications campaign on stunting awareness and promotion of exclusive breastfeeding behavior among rural Indonesian mothers. *Journal of Maternal and Child Health*, 6(5), 612–625.

Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

OECD. (2021). *Public communication: The global context and the way forward*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Organization, World Health. (2017). *Strategic communications framework for effective public health response*. Geneva: World Health Organization.

PPN/Bappenas, Kementerian. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

PPN/Bappenas, Kementerian. (2019). *Petunjuk teknis pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota*. Jakarta: Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNICEF. (2024). *Social and behavior change programming guidance*. New York: United Nations Children's Fund.